



PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RANCANGAN AKHIR RENSTRA KECAMATAN KENOHAN TAHUN 2025-2029



KECAMATAN KENOHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

bangga
melayan
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia- Nyalah akhirnya kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kenohan Tahun 2025-2029.

Renstra ini secara garis besar membahas tentang visi, misi, tujuan strategis dan sasaran serta permasalahan yang ada di Kecamatan Kenohan. Selain itu, dibahas juga tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program, kegiatan dan sub. Kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Menyadari akan keterbatasan dan kemampuan dalam menyajikan Rencana Strategis ini, sehingga terkesan masih jauh dari kesempurnaan dan harapan semua pihak. Namun kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat dapat mengarah kepada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah disepakati.

Akhirnya semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan.

Kenohan, 12 Januari 2026

Camat Kenohan,



H. KASPUL, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19680409 198903 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penyusunan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KENOHAN	 7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kenohan	 8
2.1.2 Kinerja Pelayanan kecamatan	27
2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan	48
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberi Layanan	48
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	50
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	50
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	52
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 76
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kenohan	76
1. Tujuan Renstra Kecamatan Kenohan	76
2. Sasaran Renstra Kecamatan Kenohan	77

3.2	Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kenohan Tahun 2025-2029	82
3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	87
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89
4.1	Uraian Program	90
4.2	Uraian Kegiatan	93
4.3	Uraian Sub Kegiatan	94
4.4	Pendanaan Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	107
4.5	Sub Kegiatan Prioritas	120
4.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	122
BAB V	PENUTUP	126

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Data Luas Wilayah Kecamatan Kenohan	8
Tabel	2.2	Data PNS Yang Aktif	25
Tabel	2.3	Daftar Aset Tetap Kecamatan Kenohan	27
Tabel	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kenohan	29
Tabel	2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kenohan	36
Tabel	2.6	Pemetaan Permasalahan ecamatan	51
Tabel	2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	69
Tabel	3.1	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	79
Tabel	3.2	Strategi Renstra Kecamatan Kenohan Tahun 2025-2029	82
Tabel	3.3	Penahapan Renstra PD	85
Tabel	3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	87
Tabel	4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	98
Tabel	4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	108
Tabel	4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	121
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	123

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	2.1 Peta Kecamatan	7
Gambar	2.2 Struktur Organisasi kecamatan	24
Gambar	2.3 17 Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	55
Gambar	3.1 Konsep Penyusunan Renstra PD	76
Gambar	3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	78
Gambar	4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Kenohan akan memasuki periode baru yaitu tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pasal 272 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025, menandai dimulainya Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, Kegiatan, dan Sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi: Persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kenohan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kenohan Tahun 2025 – 2029 ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan Kecamatan Kenohan dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

Dokumen Renstra Kecamatan Kenohan tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

1. Memberikan arah strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Kenohan selama lima tahun ke depan

2. Menyelaraskan program dan kegiatan kecamatan dengan tujuan pembangunan daerah
3. Mengoptimalkan potensi wilayah sebagai motor penggerak pembangunan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renstra Kecamatan Kenohan Tahun 2025 – 2029 ini adalah:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Kecamatan Kenohan
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Kenohan
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kenohan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran
5. Menyediakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja target, dan pagu indikatif
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Kenohan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kenohan Tahun 2025 – 2029 ini telah ditetapkan poin-poin yang akan disampaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan sistematika RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah;
- Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum;

- Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- Memuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- Memuat Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

BAB VI Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- Memuat Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output;
- Memuat Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya;
- Memuat Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai

kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030;

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB V Penutup

- Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Kenohan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Yang masuk dalam zona pedalaman sungai belayan yang terletak di antara 115o57' -116o33' Bujur Timur dan 0o11' Lintang Utara - 0o12 Lintang Selatan.

Kecamatan Kenohan secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara: Kembang Janggut, Sebelah Timur: Muara Kaman, Sebelah Selatan: Kota Bangun, Sebelah Barat: Kutai Barat dengan luas Kecamatan 1.319,85 Km2, Secara administratif Kecamatan Kenohan terdiri atas 9 desa yaitu Desa Lamin Telihan, Desa Lamin Pulut, Desa Teluk Bingkai, Desa Kahala, Desa Tubuhan, Desa Semayang, Desa Teluk Muda, Desa Tuana Tuha dan Desa Kahala ilir.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Kenohan



Tabel 2.1

Data Luas Wilayah Kecamatan Kenohan

No.	Desa	Luas (Km ²)
1	2	3
1	Lamin Telihan	5,043
2	Lamin Pulut	99,3
3	Teluk Bingkai	82,61
4	Kahala	152,52
5	Tubuhan	93,71
6	Semayang	106,59
7	Teluk Muda	66,52
8	Tuana Tuha	140,17
9	Kahala Ilir	74,13
	Jumlah	1.319,85

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat.

Fungsi dari kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan
2. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan kecamatan
3. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan
10. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya
11. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan; pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
12. Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan

Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas :

- a) Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan.
- b) Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugas umum pemerintahan.
- d) Merumuskan rencana strategi serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- e) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja dan Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- f) Merumuskan kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan pada seksi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum.
- g) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- h) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- i) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan

- j) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- k) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- l) Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
- m) Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- n) Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek-aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan mencakup penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- o) Merencanakan, Mengelola, Mengendalikan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- p) Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian program dan Kegiatan di tingkat kecamatan.
- q) Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati serta pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada bupati.
- r) Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dalam penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah sebagai bahan Informasi dan pertanggungjawaban kepada bupati.
- s) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut Bidang Tugas dan Tanggung Jawabnya
- t) Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Strategi serta Kebijakan Operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan pelayanan Umum.

- u) Melaksanakan dan Melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat dibantu oleh:

Sekretaris camat yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Rencana Kerja Sekretariat Kecamatan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
- b) Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas
- c) Mengkonsultasikan kegiatan Sekretariat yang bersifat Urgen kepada camat
- d) Memberikan saran dan masukan kepada Camat tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- e) Melaksanakan ketatausahaan, Tata Naskah Dinas, urusan kearsipan serta perpustakaan Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang Tugas Umum Pemerintahan, yang meliputi urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- g) Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) dan Penetapan Kinerja kecamatan
- h) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Pajak- Pajak Pribadi (LP2P) dilingkungan kecamatan.
- i) Mengkoordinasikan laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- j) Menghimpun dan menyampaikan bahan-bahan laporan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.
- k) Menyiapkan bahan-bahan penyuluhan kepada instansi terkait dan masyarakat dibidang Dokumentasi dan Informasi.
- l) Melakukan Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan unit lain yang terkait dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

- m) Menyiapkan Bahan Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Kantor, Pembinaan Serta Pengembangan Pegawai.
- n) Menyelenggarakan proses Administrasi Perizinan Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati
- o) Mengkoordinasikan Sub-Sub Bagian yang melaksanakan Urusan Umum, Kerumahtanggaan, Keuangan dan Kepegawaian di lingkungan kecamatan.
- p) Mengkoordinasikan Inventarisasi dan Mempersiapkan Urusan Penghapusan Barang
- q) Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas dan Menginventarisasi Permasalahan Sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya.
- r) Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan
- s) Melaksanakan dan melaporkan Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Camat dibantu oleh:

I. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian

yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin, Membimbing, meneliti dan Menilai Hasil Kerja Bawahan
- b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Umum berdasarkan skala Prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- d) Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan yang bersifat Urgen kepada sekretaris
- e) Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Kepegawaian
- g) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan layanan administrasi dalam lingkup Kecamatan
- h) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Kecamatan, meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol.
- i) Menyiapkan dan mengolah bahan-bahan laporan untuk penyusunan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap akhir tahun.

- j) Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan arsip yang tidak berlaku.
- k) Meneliti dan memeriksa hasil pengetikan dan pengadaan.
- l) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.
- m) Menyusun, mendistribusikan Rencana Kebutuhan Perlengkapan, Daftar Inventarisasi dan Perlengkapan Kantor.
- n) Memelihara Kebersihan Kantor dan rumah Jabatan Camat.
- o) Melaksanakan Urusan Pengadaan, Inventarisasi dan penghapusan Barang.
- p) Mengevaluasi pelaksanaan tugas menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan serta mencari alternatif pemecahannya.
- q) Menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang dilingkungan Kecamatan secara sistematis kepada kantor pengelolaan aset Daerah.
- r) Menyiapkan daftar hadir PNS dan menyusun laporan Rekapitulasi daftar hadir bulanan Pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- s) Menghimpun bahan dan Data untuk perumusan kebijakan terkait dengan Urusan Kepegawaian dan Diklat.
- t) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Kecamatan sesuai syarat yang ditentukan.
- u) Menghimpun, mengusulkan kelengkapan Administrasi Pembuatan Asuransi Kesehatan PNS, TASPEN dan TAPERUM
- v) Menghimpun, memproses Data dan mengusulkan permohonan cuti, pemberian penghargaan, pensiun, pemberian sanksi bagi PNS.
- w) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan dan fasilitasi pembuatan DP3 PNS.
- x) Menyusun Daftar Penjagaan dan Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala serta KP4 Pegawai dilingkungan Kecamatan
- y) Menghimpun dan memfasilitasi pengisian Blanko Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan (LHKPN) dan Laporan Pajak-pajak pribadi (LP2P) dilingkungan kecamatan.
- z) Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

II. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Program dan Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Anggaran dan Keuangan Tahunan sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas
- b) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan berdasarkan Skala Prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- c) Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan yang bersifat urgen kepada sekretaris.
- d) Memberikan saran dan masukan kepada sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- e) Menyiapkan, mengelola bahan untuk pengambilan kebijakan dan penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- f) Menyusun, mengusulkan dan menganalisis data dan dokumen penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- g) Menyiapkan, mengelola bahan untuk sosialisasi petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- h) Memeriksa, meneliti penyiapan bahan pencairan anggaran oleh Bendaharawan/Pemegang Kas.
- i) Memeriksa, meneliti pelaksanaan pembukuan keuangan oleh bendaharawan/ pemegang kas.
- j) Memeriksa, meneliti penyiapan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh bendaharawan /pemegang kas.
- k) Menghimpun usulan RKA/DPA unit kerja internal Kecamatan sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran.
- l) Melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran kecamatan.
- m) Menyiapkan, mengelola bahan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kecamatan.
- n) Membuat Laporan Keuangan kecamatan.
- o) Melaksanakan dan Melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

III. Kepala Seksi Pemerintahan:

Yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin, Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi pemerintahan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. Mengkonsultasikan kegiatan seksi pemerintahan yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris.
- e. Memberikan saran dan masukan kepada Camat melalui Sekertaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f. Menyusun program kerja yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa/ Kelurahan, Pembinaan bidang Pertanahan dan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan.
- g. Mempersiapkan bahan pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- h. Menyusun Rencana dan Program Kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
- i. Mendata, Menghimpun dan mengelola data yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- j. Melaksanakan Administrasi Pertanahan yang menjadi urusan Kecamatan
- k. Menyiapkan Bahan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemerintahan.
- l. Melaksanakan Pembinaan serta peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/ kelurahan.
- m. Menyelenggarakan Administrasi Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta melakukan Pelaporan
- n. Menyelenggarakan Proses Administrasi, Perizinan Bidang Pendaftaran Kependudukan dan Pertanahan yang merupakan Pelimpahan kewenangan dari Bupati
- o. Memfasilitasi, menganalisis materi Peraturan Desa dan Keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati.

- p. Menyiapkan bahan dan menyusun Monografi Kecamatan serta Pembinaan monografi desa/kelurahan.
- q. Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Keuangan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.
- r. Melaksanakan Pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD).
- s. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- t. Memfasilitasi penataan maupun perselisihan batas Wilayah antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- u. Memfasilitasi Penyelesaian pengaduan masalah pertanahan.
- v. Memfasilitasi penyusunan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala Desa dan Laporan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.
- w. Melaksanakan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- x. Menghimpun, Menyusun Data Kependudukan dan Catatan Sipil.
- y. Melaksanakan Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil terhadap pemerintahan desa/kelurahan.
- z. Melaksanakan dan melaporkan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

IV. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa:

Yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b) Menyusun Rencana kerja dan Anggaran seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman melaksanakan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersifat Urgen kepada camat melalui sekretaris.
- e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

- f) Menyusun program kegiatan pembinaan perekonomian Masyarakat Desa/ Kelurahan, Perbankan, Perkreditan Rakyat, Perkoprasian, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil, usaha Informal dan kehutanan serta peningkatan Produksi dan Distribusi hasil Produksi.
- g) Memfasilitasi, Monitoring, Evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pembangunan tingkat desa / kelurahan dan kecamatan.
- h) Mempersiapkan bahan urusan dalam bidang perindustrian dan Perdagangan, bidang bidang Pertanian, Bidang Kehutanan, bidang Lingkungan Hidup, bidang Perkoprasian, bidang Pertambangan dan Energi, Pembinaan Lingkungan Hidup.
- i) Memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan peran serta, prakarsa dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat.
- j) Melaksanakan Pengumpulan dan pelaporan Data Kegiatan usaha Industri kecil, sumber Daya Alam dan sumber Daya manusia sektor Industri.
- k) Melaksanakan pengumpulan, Koordinasi dan Pelaporan data bidang pertanian.
- l) Melakukan koordinasi, Bimbingan dan pemantauan terhadap ketahanan pangan di wilayah Kecamatan, pengembangan Kelompok Tani dan kelembagaan Ekonomi Petani, Kelembagaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.
- m) Monitoring, melaporkan perkembangan harga sembilan bahan pokok
- n) Mengkoordinasikan pembinaan, pemantauan dan perlindungan terhadap koperasi, usaha perkebunan dan Peternakan.
- o) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.
- p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data profil Kecamatan dan Desa, data kegiatan Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.
- q) Menyelenggarakan proses Administrasi Perizinan bidang Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, Pertambangan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari bupati.
- r) Melaksanakan Pengumpulan dan Pelaporan data Perumahan, bangunan

gedung dan drainase lingkungan.

- s) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkungan.
- t) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan lokasi daur ulang sampah (LDUS) dan air bersih Pedesaan.
- u) Melaksanakan koordinasi dan Sosialisasi rencana tata ruang.
- v) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan Data sumber pencemaran lingkungan hidup, sumber Daya Alam dan sumber daya buatan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan lingkungan hidup.
- w) Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air.
- x) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data penambangan sumber daya mineral dan energi dan pengambilan air bawah tanah.
- y) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

V. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:
Yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas sebagai pedoman melaksanakan tugas.
- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban umum dan linmas yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris.
- e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta tertib perizinan.
- g) Mempersiapkan bahan serta penyelenggaraan pembinaan aparat penertiban, Polisi Pamong Praja, Linmas Kecamatan dan Linmas Desa/ kelurahan

- h) Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, potensi perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- i) Menghimpun, menyusun serta mengolah data, melakukan koordinasi dengan unit lain terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
- j) Mengatur penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban.
- k) Penegakan, pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- l) Menyiapkan bahan pembinaan dalam langkah pembauran Kesatuan Bangsa.
- m) Melaksanakan identifikasi potensi masalah ketentraman dan ketertiban serta upaya pencegahan.
- n) Memproses Administrasi, rekomendasi dan perizinan bidang politik dalam negeri dan Administrasi publik yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- o) Menginventarisasi, menyusun dan melaporkan data bidang ketentraman dan ketertiban serta Linmas.
- p) Melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- q) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang.
- r) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data WNI ketrurunan dan WNA.
- s) Mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan ummat beragama.
- t) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- u) Melakukan Pencegahan atas pengelolaan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.
- v) Melakukan pencegahan dan penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, Zat adiktif dan bahan berbahaya.
- w) Melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah.

- x) Melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.
- y) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial:

Yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin, Membimbing, Meneliti dan menilai hasil Kerja Bawahan.
- b) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas.
- c) Menyusun Sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan Skala Prioritas sebagai Pedoman dalam Melaksanakan Tugas.
- d) Mengkonsultasikan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial yang bersifat Urgen kepada Camat melalui Sekretaris.
- e) Memberikan Saran dan Masukan kepada Camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya.
- f) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan serta bantuan sosial, Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olahraga, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- g) Mempersiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.
- h) Menghimpun, menyusun dan mengolah data, menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan bidang kesejahteraan sosial.
- i) Melaksanakan urusan bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, kepemudaan, olah raga, peranan wanita, dan kehidupan beragama.
- j) Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemberdayaan lembaga Adat.
- k) Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang ketenagakerjaan dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati
- l) Melaksanakan koordinasi program keluarga berencana (KB).
- m) Menghimpun dan menyusun data bantuan sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan.

- n) Menyiapkan bahan pembinaan bagi penderita cacat, tuna karya, tunawisma, tuna rungu, tuna susila dan panti asuhan.
- o) Menyiapkan bahan dan data untuk pengajuan permintaan bantuan bagi korban bencana serta pendistribusiannya.
- p) Menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan.
- q) Menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial.
- r) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaaan dan keolahragaan.
- s) Menyiapkan bahan pembinaan serta sosialisasi kesejahteraan keluarga peranan wanita dan organisasi kewanitaan.
- t) Melaksanakan pendataan mengenai angkatan tenaga kerja sebagai bahan pembinaan tenaga kerja.
- u) Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk.
- v) Menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah, maupun luar sekolah dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan.
- w) Melaksanakan koordinasi pemberantasan wabah penyakit, imunisasi balita dan anak sekolah.
- x) Melaksanakan koordinasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi, kegiatan posyandu.
- y) Menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana peribadatan dan kehidupan beragama.
- z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

VII. Kepala Seksi Pelayanan Umum:

Yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Memimpin, membimbing, meneliti hasil kerja bawahan.
- b) Menyusun rencana kerja dan anggaran Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- c) Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Seksi Pelayanan Umum berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d) Mengkonsultasikan kegiatan seksi pelayanan umum yang bersifat urgen kepada camat melalui sekretaris.
- e) Memberikan saran dan masukan kepada camat melalui sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- f) Menyusun rencana dan program seksi pelayanan umum sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kekayaan, inventarisasi desa/ kelurahan, kebersihan, sarana dan prasarana umum.
- g) Menyusun rencana kerja, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan perizinan.
- h) Menginventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah di lingkup kecamatan.
- i) Menyelenggarakan proses administrasi perizinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- j) Melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman.
- k) Menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan.
- l) Menghimpun dan mengolah data potensi wilayah sebagai bahan perencanaan dan pengembangan wilayah kecamatan.
- m) Meneliti dan melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perizinan serta menetapkan besaran retribusi.
- n) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- o) Menginventarisasi kantor, rumah dinas, balai desa dan bangunan milik pemerintah lainnya.
- p) Melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
- q) Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah.
- r) Menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan.
- s) Menghimpun, mengolah data, dan membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.

- t) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan
- u) Melakukan pemantauan terhadap pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, drainase pedesaan dan pemukiman.
- v) Melaksanakan pengendalian pemanfaatan daerah milik jalan dan saluran drainase, daerah milik irigasi dan sumber daya air
- w) Melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase.
- x) Mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum.
- y) Melaksanakan pemantauan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi desa, jaringan tersier dan jaringan irigasi sumur pompa.
- z) Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.

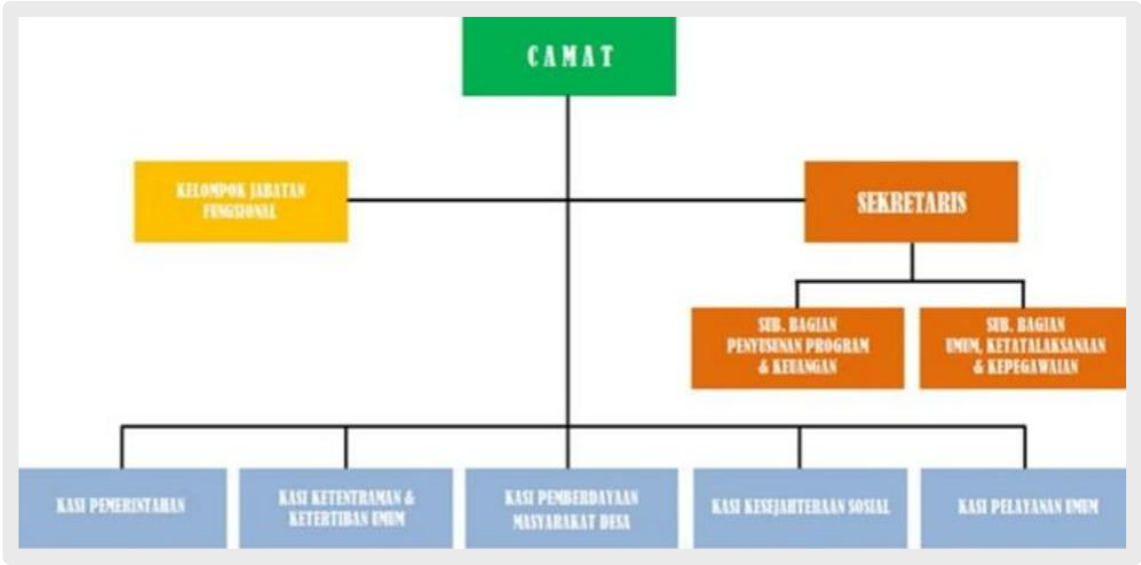
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka struktur organisasi Kecamatan Kenohan terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin Sekretaris Kecamatan, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
3. Seksi-seksi yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi pelayanan Publik
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Seksi Ketentraman dan ketertiban
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kenohan sebagai berikut :

Gambar 2.2

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KENOHAN



1. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kenohan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Kenohan pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berupa Pegawai dan sumber daya lainya berupa sarana dan prasarana yang dimiliki.

a. Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SLTA	9	0	9	52,94 %
2	D-II	1	0	1	5 %
3	D-III	0	1	1	5 %
4	S1	5	0	5	29,41 %
5	S2	1	0	1	5 %
Jumlah		16	1	17	100,00 %

b. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II	9	0	9	52,94 %
2	III	6	0	6	35,29 %
3	IV	2	0	2	11,76 %
	Jumlah	17	0	17	100 %

c. Sumber daya manusia atau pegawai yang ada di Kecamatan Kenohan

Tabel. 2.2

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKTIF DI KECAMATAN KENOHAN

No	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	KET
1	H. KASPUL, SE.M.Si	19680409 198903 1 005	CAMAT	PEMBINA TINGKAT I (IV/b)	S.2	AKTIF
2	MISRI, S.Sos	19691005 200003 1 006	SEKCAM	PENATA TINGKAT I (III/d)	S.1	AKTIF
3	MOHAMMAD JAHREI, SE	19691101 199203 1 017	KASI PEMERINTAHAN	PENATA TINGKAT I (III/d)	S.1	TIDAK AKTIF
4	EDUWIN, SP	19820101 200801 1 035	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PENATA TINGKAT I (III/d)	S.1	AKTIF
5	RIDUAN SYAHRANI, S.Pi	19760801 200701 1 021	KASI PELAYANAN UMUM	PEMBINA (IV/a)	S.1	AKTIF
6	MUHAMMAD SAID,S.IP, M.A.P	19830430 200112 1 003	KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	PENATA MUDA TK I (III/b)	S.2	AKTIF
7	SYAHRUDDIN	19750913 200003 1 003	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	PENATA MUDA TK I (III/b)	SMU	AKTIF
8	ALBERT ANTHONI	19771230 200112 1 003	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	SMU	AKTIF

No	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	KET
9	EVA AYU PUSPITA, A.Md.Kep	19851111 201101 2 002	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	PENGATUR MUDA (III/a)	D-III	AKTIF
10	ALBERT ANTHONI	19771230 200112 1 003	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	SMU	AKTIF
11	ARBUDIANSYAH	19750212 200701 1 026	PEMBUAT DAFTAR GAJI	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	SMU	AKTIF
12	ZAINUDDIN	19770305 200906 1 003	PENGOLAH DATA	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	SMU	AKTIF
13	HEFNI EFFENDI SIREGAR, A.Ma.Pd.SD	19820414 200801 1 015	PENGOLAH DATA	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	D-II	AKTIF
14	JOHN AKHMADA	19860129 201001 1 008	PENGOLAH DATA	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	SMU	AKTIF
15	YANIANSYAH	19680806 200701 1 054	PENGADMINISTRASI UMUM	PENGATUR (II/c)	SMU	AKTIF
16	RODI HARTONO	19770706 200701 1 046	PENGURUS BARANG	PENGATUR (II/c)	SMU	AKTIF
17	SURIANSYAH	19800202 201001 1 004	PENGOLAH DATA	PENGATUR (II/c)	SMU	AKTIF

Dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Kenohan dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja adalah aset tetap yang perolehannya berasal dari hasil pengadaan/pembelian serta berasal dari hibah, antara lain :

Tabel 2.3

DAFTAR ASET TETAP KECAMATAN KENOHAN

No.	MACAM ASET TETAP	NILAI (Rp.)
1	2	3
1.	Tanah	243.750.000
2.	Peralatan dan Mesin	3.744.308.247
3.	Gedung dan Bangunan	12.330.825.317
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.386.579.757,98
5.	Aset tetap lainnya	0,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(13.264.886.009,00)
JUMLAH		15.440.577.312,98

Sumber Neraca Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan

2.1.2 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kenohan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kenohan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan. Bahwa Kecamatan Kenohan adalah unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Masyarakat, Sehingga secara garis besar unsur pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Kenohan adalah penyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan Masyarakat.

Pelayanan di bidang Pelayanan Masyarakat ini ditunjukkan melalui penyediaan perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut tidak terlepas dari kerjasama diantara personel Pegawai di lingkungan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kerjasama lintas sektoral diantara satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Sementara Output pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

1. Penelitian dan Pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan strategis pelayanan di kawasan strategis daerah;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta asistensi penyusunan rencana strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti KUA dan Dokumen lain.
3. Penyusunan rencana induk (*masterplan*), rencana umum, studi kelayakan (*feasibility study*) kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah;
4. Penataan Ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Kawasan Strategis Daerah;
5. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pelayanan Masyarakat, berupa pendataan dan analisis kinerja pelayanan yang dilakukan oleh seluruh SKPD serta penyediaan data umum Pelayanan Masyarakat;
6. Pelayanan Ketatausahaan Kecamatan Kenohan, berupa Pengelolaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kenohan, Pengelolaan Keuangan Kecamatan Kenohan, Pengelolaan Kepegawaian Kecamatan Kenohan, dan Ketatausahaan umum lainnya;

Secara lengkap, pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kenohan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
I	Indikator Tujuan Dan Sasaran:																
	Indikator Tujuan:																
	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	85	85	85	85	85	86,41	89,01	90,42	n/a	n/a	101,66	104,72	106,38	-	-
	Indikator Sasaran:																
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75	75	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	133	133	100	-	-
	Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	75	75	75	75	75	100	100	100	n/a	n/a	133,33	133,33	133	-	-
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	0	0	0	0	0	557,65	112,43	25,4	n/a	n/a	-	-	-	-	-
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	-	-	-	-	-
II	Indikator Program:																
III	Indikator Kegiatan:																
II	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	80	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	125	125	100	-	-
	Jumlah desa/kelurahan yang terhubung ke ibu kota Kecamatan melalui jalur darat dibagi total desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan dikali 100	Persen	88,46	88,46	88,46	88,46	88,46	86,36	86,36	86,36	n/a	n/a	98	98	98	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
III	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	12	12	22	3	3	23	23	23	n/a	n/a	192	192	105	-	-
	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kali	12	12	10	10	2	12	12	12	n/a	n/a	100	100	120	-	-
	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	12	12	12	12	1	11	11	11	n/a	n/a	92	92	92	-	-
III	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	0	0	0	0	0	12	12	12	n/a	n/a	-	-	-	-	-
	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kali	0	0	0	0	0	12	12	12	n/a	n/a	-	-	-	-	-
III	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	152	152	13	13	38	2	2	2	n/a	n/a	1	1	15	-	-
	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	-	-	-	-	-
	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Dokumen	25	25	4	4	12	3	1	1	n/a	n/a	12	4	25	-	-
II	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
III	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	12	11	11	11	12	12	12	n/a	n/a	100	100	109	-	-
	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	150	150	9	9	9	30	50	50	n/a	n/a	20	33	556	-	-
	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	11	11	11	n/a	n/a	-	-	-	-	-
	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kegiatan	3	3	2	2	2	3	3	3	n/a	n/a	100	100	150	-	-
II	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	0	0	2	2	2	2	5	5	n/a	n/a	-	-	250	-	-
	Jumlah kegiatan pemerintahan yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kegiatan	2	2	4	4	4	1	5	5	n/a	n/a	50	250	125	-	-
	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kegiatan	5	5	2	2	2	1	4	4	n/a	n/a	20	80	200	-	-
II	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	6	5	1	1	1	5	5	5	n/a	n/a	83	100	500	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	23	23	70	70	70	35	35	40	n/a	n/a	152	152	57	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	70	70	70	70	70	70	70	70	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kali	2	2	0	0	12	1	1	1	n/a	n/a	50	50	-	-	-
II	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	9	9	9	9	9	100	100	100	n/a	n/a	1111	1111	1111	-	-
III	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	9	9	9	9	9	11	11	11	n/a	n/a	122	122	122	-	-
	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	9	9	9	9	11	11	11	n/a	n/a	122	122	122	-	-
II	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	70	74	75	76	0	91,3	76,83	74,61	n/a	0	130	104	99,48	-
III	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	14	14	67	35	44	58	58	n/a	n/a	314	414	414	-	-
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3	3	2	10	10	10	n/a	n/a	500	500	333	-	-
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	2	0	7	7	7	n/a	n/a	350	350	350	-	-
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	2	2	0	7	7	7	n/a	n/a	350	350	350	-	-
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	2	0	7	7	7	n/a	n/a	350	350	350	-	-
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2	2	0	7	7	7	n/a	n/a	350	350	350	-	-
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	3	3	3	20	20	20	n/a	n/a	1000	1000	667	-	-
III	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		56	56	26	303	301	37	37	37	n/a	n/a	66	66	142	-	-
	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	23	23	24	24	24	30	30	30	n/a	n/a	130	130	125	-	-
	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Laporan	8	8	24	24	24	24	24	24	n/a	n/a	300	300	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	1	1	1	5	5	5	n/a	n/a	250	250	500	-	-
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	5	5	0	1	4	5	55	55	n/a	n/a	100	1100	-	-	-
	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	0	1	4	4	4	4	n/a	n/a	200	200	-	-	-
	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Unit	2	2	0	1	4	0	0	0	n/a	n/a	0	0	-	-	-
	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	2	2	0	1	1	4	4	4	n/a	n/a	200	200	-	-	-
	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	n/a	n/a	100	100	100	-	-
III	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	23	23	24	24	24	30	30	30	n/a	n/a	130	130	125	-	-
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	23	23	24	24	24	0	40	0	n/a	n/a	0	174	0	-	-
III	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	10	9	9	9	9	7	9	9	n/a	n/a	70	100	100	-	-
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	0	1	1	n/a	n/a	0	100	100	-	-
	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	-	-	-	-	-
	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	-	-	100	-	-
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Bulan	50	50	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	24	24	100	-	-
	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Unit	2	2	2	2	2	8	8	8	n/a	n/a	400	400	400	-	-
III	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	0	0	0	1	1	2	3	0	n/a	n/a	-	-	-	-	-
	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	0	0	0	1	1	1	1	0	n/a	n/a	-	-	-	-	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	0	0	0	1	1	1	1	0	n/a	n/a	-	-	-	-	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	0	0	0	1	1	0	1	0	n/a	n/a	-	-	-	-	-
III	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah surat menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100	100	100	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Persentase Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
III	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	0	0	5	5	5	78	78	78	n/a	n/a	-	-	1560	-	-
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Unit	0	0	5	5	5	10	10	10	n/a	n/a	-	-	200	-	-
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	0	8	3	3	3	3	3	3	n/a	n/a	-	38	100	-	-
	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	50	50	30	30	30	30	0	0	n/a	n/a	60	0	0	-	-
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	25	25	25	25	25	25	25	25	n/a	n/a	100	100	100	-	-
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	5	5	5	1	5	5	n/a	n/a	100	500	100	-	-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	5	5	5	1	1	1	n/a	n/a	100	100	20	-	-

Tabel. 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kenohan

Kabupaten Kutai Kartanegara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara	4.428.870.537	31.263.064.520	12.810.942.105	8.857.378.616	16.668.687.741	4.272.994.703	28.109.819.993	11.109.877.528	n/a	n/a	96	90	87	-	-	151,05%	-0,42%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.192.030.000	23.973.158.950	6.836.685.000	2.769.786.408	2.246.216.000	3.190.532.266	22.407.490.412	6.459.434.197	n/a	n/a	100	93	94	-	-	125,29%	-37,47%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	-	-	-	348.904.000	300.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-3,50%	-3,50%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	121.463.000	50.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-14,71%	-14,71%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	-	-	-	227.441.000	250.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	2,48%	2,48%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	-	-	-	56.760.000	50.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-2,98%	-2,98%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	-	-	-	49.260.000	50.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,38%	0,38%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	3.192.030.000	23.973.158.950	6.836.685.000	2.364.122.408	1.896.216.000	3.190.532.266	22.407.490.412	6.459.434.197	n/a	n/a	100	93	94	-	-	123,58%	-39,17%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan	10.000.000	430.839.000	615.065.000	628.031.800	796.216.000	9.600.000	7.720.000	520.509.000	n/a	n/a	96	2	85	-	-	1070,01%	17,91%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	3.182.030.000	23.542.319.950	6.221.620.000	1.736.090.608	1.100.000.000	3.180.932.266	22.399.770.412	5.938.925.197	n/a	n/a	100	95	95	-	-	114,39%	-45,58%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	337.970.000	606.624.000	1.049.759.000	547.348.200	8.826.800.000	313.132.500	529.199.000	834.686.000	n/a	n/a	93	87	80	-	-	404,33%	384,46%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	337.970.000	606.624.000	1.049.759.000	155.991.000	100.000.000	313.132.500	529.199.000	834.686.000	n/a	n/a	93	87	80	-	-	7,88%	-12,00%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	26.970.000	30.000.000	-	122.021.000	50.000.000	16.947.500	28.550.000	-	n/a	n/a	63	95	-	-	-	-36,95%	-39,76%
Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	311.000.000	576.624.000	1.049.759.000	33.970.000	50.000.000	296.185.000	500.649.000	834.686.000	n/a	n/a	95	87	80	-	-	29,47%	8,12%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	391.357.200	8.726.800.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	532,47%	532,47%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	391.357.200	8.651.120.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	527,64%	527,64%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	391.357.200	75.680.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-20,17%	-20,17%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	141.835.000	145.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,56%	0,56%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	-	-	141.835.000	145.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,56%	0,56%
Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	141.835.000	95.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-8,26%	-8,26%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	183.225.000	195.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	1,61%	1,61%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	183.225.000	195.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	1,61%	1,61%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	-	-	-	183.225.000	180.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-0,44%	-0,44%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	35.000.000	-	-	10.000.000	10.850.000	4.050.000	-	n/a	n/a	54	12	-	-	-	-6,25%	-25,00%
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.000.000	35.000.000	-	-	10.000.000	10.850.000	4.050.000	-	n/a	n/a	54	12	-	-	-	-6,25%	-25,00%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	17.500.000	-	-	-	6.100.000	-	-	n/a	n/a	61	0	-	-	-	-6,25%	-25,00%
Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya	10.000.000	17.500.000	-	-	10.000.000	4.750.000	4.050.000	-	n/a	n/a	48	23	-	-	-	-6,25%	-25,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	878.870.537	6.648.281.570	4.924.498.105	5.215.184.008	5.245.671.741	758.479.937	5.169.080.581	3.815.757.331	n/a	n/a	86	78	77	-	-	159,25%	-4,86%
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.325.000	85.000.000	29.600.000	340.667.825	62.784.000	21.600.000	27.080.000	24.874.000	n/a	n/a	46	32	84	-	-	245,94%	226,04%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.800.000	25.000.000	15.000.000	63.916.200	20.000.000	8.400.000	4.790.000	12.834.000	n/a	n/a	50	19	86	-	-	66,55%	54,35%
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	-	10.000.000	-	2.770.000	-	-	9.600.000	-	n/a	n/a	-	96	-	-	-	-50,00%	-50,00%
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	-	-	-	2.770.000	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	10.000.000	-	-	-	-	9.600.000	-	-	n/a	n/a	96	-	-	-	-	-25,00%	0,00%
Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	20.525.000	50.000.000	14.600.000	31.667.725	-	3.600.000	12.690.000	12.040.000	n/a	n/a	18	25	82	-	-	22,43%	-13,47%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	27.315.800	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	200.013.700	42.784.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-19,65%	-19,65%
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	12.214.400	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.000	3.373.086.961	3.878.133.836	3.290.044.117	4.440.581.741	-	2.778.054.096	2.863.706.875	n/a	n/a	0	82	74	-	-	#####	8,69%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	-	3.290.574.961	3.770.221.836	3.184.416.117	4.315.981.741	-	2.701.554.096	2.759.326.875	n/a	n/a	-	82	73	-	-	8,64%	8,64%
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	-	-	20.000.000	10.446.000	10.000.000	-	-	19.180.000	n/a	n/a	-	-	96	-	-	-13,01%	-13,01%
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	252.000	82.512.000	87.912.000	82.512.000	114.600.000	-	76.500.000	85.200.000	n/a	n/a	0	93	97	-	-	8170,54%	9,82%
Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	12.670.000	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-	34.200.000	34.200.000	178.639.225	24.800.000	-	33.400.000	34.200.000	n/a	n/a	-	98	100	-	-	84,05%	84,05%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	-	-	-	11.505.400		-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	-	-	-	109.680.625	20.000.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-20,44%	-20,44%
Koordinasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah Skpd	-	-	-	23.253.200	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	-	34.200.000	34.200.000	34.200.000	4.800.000	-	33.400.000	34.200.000	n/a	n/a	-	98	100	-	-	-21,49%	-21,49%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	700.500.000	-	-	-	-	70.005.000	-	n/a	n/a	-	10	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	700.500.000	-	-	-	-	70.005.000	-	n/a	n/a	-	10	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.436.234	557.280.000	328.833.029	135.560.000	237.456.000	101.471.907	494.304.244	313.862.000	n/a	n/a	78	89	95	-	-	76,49%	-6,15%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	10.500.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	50.000.000	57.105.000	35.000.000	55.000.000	9.971.907	49.570.000	54.699.000	n/a	n/a	100	99	96	-	-	108,16%	8,16%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	35.000.000	10.000.000	5.000.000	-	-	11.251.000	6.200.000	n/a	n/a	0	32	62	-	-	94,64%	-55,36%
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	2.280.000	2.280.000	2.412.029	2.280.000	2.280.000	-	-	-	n/a	n/a	0	0	0	-	-	0,08%	0,08%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	92.156.234	450.000.000	254.616.000	84.280.000	169.676.000	91.500.000	418.431.244	252.963.000	n/a	n/a	99	93	99	-	-	94,83%	-2,25%
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd	20.000.000	20.000.000	4.700.000	9.000.000	-	-	15.052.000	-	n/a	n/a	0	75	0	-	-	-21,25%	-21,25%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.143.236.050	78.931.000	445.000.000	-	-	1.049.000.000	76.300.000	n/a	n/a	-	92	97	-	-	67,67%	67,67%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	361.280.050	-	-	-	-	355.400.000	-	n/a	n/a	-	98	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	-	600.000.000	-	-	-	-	514.000.000	-	n/a	n/a	-	86	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	-	181.956.000	-	-	-	-	179.600.000	-	n/a	n/a	-	99	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	445.000.000	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	-25,00%	-25,00%
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	78.931.000	-	-	-	-	76.300.000	n/a	n/a	-	-	97	-	-	-25,00%	-25,00%
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.857.303	487.003.559	526.279.817	575.272.841	278.800.000	461.540.782	466.189.337	502.814.456	n/a	n/a	92	96	96	-	-	-9,28%	-8,54%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.009	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-	2.899.000	2.895.000	2.895.000	n/a	n/a	100	100	100	-	-	-25,00%	-25,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	105.000.000	121.146.265	124.915.955	272.000.000	278.800.000	101.767.092	111.533.436	118.495.236	n/a	n/a	97	92	95	-	-	34,68%	30,84%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	20.000.000	7.500.000	5.000.000	-	4.983.900	16.610.000	7.500.000	n/a	n/a	100	83	100	-	-	26,04%	-48,96%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	388.957.294	342.957.294	390.963.862	295.372.841	-	351.890.790	335.150.901	373.924.220	n/a	n/a	90	98	96	-	-	-30,57%	-27,61%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000	267.975.000	48.520.423	250.000.000	201.250.000	173.867.248	251.047.904	-	n/a	n/a	87	94	0	-	-	86,96%	78,46%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	50.000.000	51.250.000	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,63%	0,63%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	200.000.000	267.975.000	48.520.423	200.000.000	150.000.000	173.867.248	251.047.904	-	n/a	n/a	87	94	0	-	-	59,82%	51,33%
Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Pada tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan setiap tahunnya dibandingkan dengan target pada renstra periode 2022 – 2026 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai dan untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan Kecamatan tidak terealisasi dikarenakan pemungutan retribusi yang ada di kecamatan sudah dipindah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain:

- Adanya sumber dana yang cukup dari APBD;
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian;
- Merupakan hasil kerjasama tim seluruh aparatur di lingkup Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Adapun sumber keuangan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Kenohan adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Tabel 2.5 di atas menyajikan data anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2022-2026 dan data realisasi berdasarkan pagu anggaran DPA, ada empat program utama Kecamatan Kenohan dari tahun 2022 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup baik.

Secara keseluruhan, Kecamatan Kenohan menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi cukup tinggi, meskipun terdapat penurunan alokasi pada beberapa program karena adanya penyesuaian anggaran pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari tabel 2.5 di atas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara antara tahun 2022 sampai dengan 2026 cukup baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Kenohan sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Kenohan

Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- Penyusunan RKA DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target;
- Kerjasama tim pengelola anggaran yang memadai baik Pengguna Anggaran, Bendahara, PPTK maupun Pejabat
- Penatausahaan Keuangan di Kecamatan Kenohan.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran di beberapa sub kegiatan seperti seperti Belanja Logistik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan dan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd.

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kenohan yaitu Masyarakat di wilayah Kecamatan Kenohan sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti forpimcam, lembaga, dll Masyarakat Kecamatan Kenohan sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran Kecamatan Kenohan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT yang bisa dicapai dengan komitmen , anggaran dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.4 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Kenohan dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah Kecamatan Kenohan maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan antara lain:

- Polsek Kenohan untuk menyediakan layanan keamanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di

masyarakat. Koramil Kenohan untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.

- Puskesmas Kecamatan Kenohan untuk melakukan pelaksanaan koordinasi fasilitasi penurunan stunting, posyandu di kecamatan dan pelayanan dasar Kesehatan untuk masyarakat.
- Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- Bappeda untuk memberikan berbagai pelayanan kepada Kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah Kecamatan Kenohan berjalan dengan baik dan terarah.
- DPMD untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat Kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa, termasuk pengelolaan POSYANTEK Antar Desa di wilayah kecamatan.
- Dispendukcapil mitra kerja dalam hal pelayanan penerbitan KTP dan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- Tim Penggerak PKK di tingkat kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Kenohan.
- Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima

pengaduan Masyarakat dari kecamatan.

- Bapenda mitra kerja pelayanan di kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2.
- Dinas Sosial mitra pelayanan di kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Masyarakat Kecamatan Kenohan sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran Kecamatan Kenohan adalah “Meningkatnya layanan administrasi Kecamatan” Pelayanan dapat dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Kenohan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kenohan. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kenohan maka dapat dirumuskan permasalahan di wilayah ini. Permasalahan Kecamatan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah.

Tabel 2.6

Pemetaan Permasalahan Kecamatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
		Masih minimnya infrastruktur yang mendukung dalam pelayanan publik khususnya berbasis digital
		Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan
		Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.
		Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang belum merata
		Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena mesin rusak
	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)
		Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.
		Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
		Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait
		Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
		Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan
		Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
		Keterbatasan akses jalan menuju kantor Kecamatan atau desa tertentu
		Belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk menuju Kecamatan, hanya tersedia moda transportasi antar kota.
		Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis
		Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, dll

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Belum optimalnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola pendapatan asli desa
		Masih terbatasnya pembinaan terhadap aparatur desa
		Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Minimnya pelaksanaan forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral di tingkat kecamatan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di Kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemda.
		Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.
		Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan.
		Kurangnya pelatihan bagi perangkat Kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.
		Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
		Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengolahan data.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional).

Sebelum perumusan isu strategis Kecamatan, berikut ini dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, serta beberapa aspek lainnya.

- Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan dimulai dengan merumuskan Visi, Misi, dan nilai-nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi ke depan agar dapat eksis, bersifat antisipatif, dan inovatif.

Adapun Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai berikut:

“ Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “

Terdapat lima sasaran visi yaitu :

➤ Pusat Pangan

Menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan ketahanan pangan dan nilai tambah ekonomi.

➤ Pariwisata

Mengembangkan potensi lokal untuk menarik investasi dan kunjungan wisata.

➤ Industri Hijau

Mendorong industri ramah lingkungan, ramah sosial, dan berkelanjutan secara operasional.

➤ Masyarakat Sejahtera

Fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui pemerataan layanan dasar.

➤ Pembangunan Berkelanjutan

Meniti jalan pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang tanpa mengorbankan lingkungan atau keadilan sosial.

Misi merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh perangkat daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Sedangkan Misi yang ditetapkan guna pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 tersebut adalah :

Misi 1 :

Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial

Sasaran Kebijakan: Penguatan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Kualitas Layanan Publik, Fasilitas Kesejahteraan ASN, Penerapan Kerjasama Pemerintah Daerah.

Program Prioritas:

- a. Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia
- b. Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa
- c. Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik
- d. Program Etam Sejahtera

Misi 2 :

Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif

Sasaran Kebijakan: Kualitas Layanan Pendidikan, Kualitas Layanan Kesehatan, Kompetensi Tenaga Kerja, Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial dan Pelestarian Budaya Daerah.

Program Prioritas:

- a. Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera.
- b. Program Petani/Peternak/ Nelayan Tangguh;
- c. Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.
- d. Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.
- e. Program Stimulus Komunitas Kreatif

Misi 3 :

Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;

Sasaran Kebijakan: Pembangunan Pertanian dalam arti luas, optimalisasi potensi Wisata Alam, Sejarah dan Budaya dan Pengembangan UMKM

Program Prioritas:

- a. Program Pelayanan Publik Cerdas;
- b. Program ASN Kukar Terbaik.

Misi 4 :

Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;

Sasaran Kebijakan: Infrastruktur Wilayah, Perumahan, Air Bersih, dan Energi

Program Prioritas:

- a. Program RT Ku-Terbaik
- b. Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku
- c. Program Jaga Lingkungan Lestari

Misi 5 :

Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

Sasaran Kebijakan: Pembangunan Daerah Berbasis Lingkungan Hidup yang Lestari

Program Prioritas:

- a. Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.
- b. Program Internet Desa Gratis.
- c. Program Permukiman Idaman Terbaik.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih di atas selanjutnya dijabarkan dalam 17 Program Dedikasi yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada gambar 2.3 di bawah ini:

Gambar 2.3

17 Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

17 PROGRAM DEDIKASI



Misi#1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia; Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pasantren Idaman Terbaik Program Etam Sejahtera	Misi#2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh Program Kredit Kukur Idaman Terbaik. Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah. Program Stimulus Komunitas Kreatif
Misi#3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.	Program Pelayanan Publik Cerdas Program ASN Kukur Terbaik	Misi#4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.	Program RT Ku-Terbaik Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku. Program Jaga Lingkungan Lestari
Misi#5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik. Program Internet Desa Gratis. Program Permukiman Idaman Terbaik.		

Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, maka Kecamatan Kenohan mendukung secara langsung pada misi 3 (tiga) dengan program dedikasi: a). Program Pelayanan Publik Cerdas dan misi 4 (empat) dengan program dedikasi b). Program RT-ku Terbaik. Selain itu, Kecamatan Kenohan juga mendukung secara tidak langsung terhadap program-program dedikasi lainnya.

Adapun penjelasan kedua program dedikasi yang di dukung secara langsung oleh Kecamatan Kenohan tersebut termasuk dalam 17 program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia.

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, berupa pemberian makanan pokok bergizi pada balita atau kategori PAUD sebagai Upaya mengeliminasi angka gizi buruk dan gizi kurang khususnya pada keluarga prasejahtera, serta pengurangan resiko angka prevalensi stunting, selanjutnya memberikan bantuan makanan sehat bagi lansia melalui penguatan posyandu, dengan pola pelaksanaan yang sinergi, tertib, dan berbasis data, serta ditopang oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pengendalian yang berkala

2. Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, dengan meringankan beban biaya perlengkapan sekolah dan biaya transportasi pada murid PAUD-SD SMP, dengan penyediaan baju seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi murid setiap tahunnya, salah satunya melalui peningkatan BOSKAB pada masing-masing sekolah, khusus untuk fasilitasi transportasi sekolah disediakan sarana dan prasarana antar jemput sekolah, dengan unit transportasi menyesuaikan karakteristik wilayah Kutai Kartanegara dengan standar keamanan yang layak. Selain daripada itu untuk menurunkan resiko putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan di wilayah terpencil, dikembangkan sekolah menengah pertama (SMP) berasrama (boarding school) bersubsidi dan berbasis pilot project pada lokasi yang dapat menjadi simpul dalam satu wilayah kecamatan.

Untuk memastikan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan mendorong pencapaian prioritas daerah, maka tetap dilanjutkan program beasiswa/ stimulan kepada siswa/siswi Kutai Kartanegara, dengan sasaran prioritas:

- a. Penyiapan Siswa Sekolah Kedinasan,
- b. Masyarakat Prasejahtera, dan
- c. Siswa/Siswi. Berprestasi pada jenjang SD SMP, SMU/ Sederajat,

Beasiswa tuntas bagi mahasiswa Kutai Kartanegara khususnya menunjang penyediaan tenaga layanan dasar dan penyediaan tenaga teknis yang sejalan dengan prioritas daerah, diantaranya adalah: Tenaga Pendidik, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Teknik Industri, Seni, Sastra dan Budaya, serta Teknologi Informasi dengan target minimal 1.000 Orang Mahasiswa, yang dikelola secara profesional bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi minimal Baik Sekali.

Selain daripada itu dikhususkan pula beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat tergolong pra sejahtera dalam kerangka kebijakan “Satu KK Satu Sarjana”

3. Program Bantuan Sekolah Swasta/ Pondok Pesantren Idaman Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat sekolah swasta sebagai bagian dari satuan pendidikan di Kutai Kartanegara, dengan memberikan program bantuan berbasis sekolah swasta/pondok pesantren bagi peningkatan kesejahteraan dan kapasitas guru swasta, sarana dan prasarana Sekolah.

4. Program Etam Sejahtera

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat prasejahtera, dengan memberikan bantuan pangan bagi kelompok kategori jompo, disabilitas dan anak terlantar kategori miskin. Memastikan jaminan kesehatan terpenuhi 100%, jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan termasuk relawan kebencanaan/kemanusiaan, dan perbaikan rumah tidak layak huni minimal 500 unit per tahun, serta memfasilitasi kelompok disabilitas agar mendapat akses pada lapangan kerja formal dan informal melalui penguatan dan integrasi program kukar siap kerja dan klinik wirausaha pemuda mandiri, dengan membuka unit layanan peningkatan keterampilan bagi pencari kerja hingga di setiap Kecamatan. Khusus untuk peningkatan pelayanan kesehatan dikembangkan jaminan kesehatan, dengan pola Berobat Gratis cukup dengan KTP.

5. Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk pembangunan kawasan-kawasan strategis/khusus untuk mempersiapkan simpul kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien, berbasis pada sumber daya ekonomi terbarukan, dengan membangun pola hubungan industri hulu dan hilir yang produktif, dalam satu kesatuan wilayah ekonomi potensial, dengan tujuan menciptakan suatu ekosistem perekonomian wilayah yang menjangkau seluruh potensi daerah secara terintegrasi dan terstruktur dalam bingkai rantai nilai yang saling terkait, dengan melakukan serangkain kegiatan, mulai dari penyiapan lahan, SDM, sarana dan prasarana, jaringan logistik, tata kelola pengairan, hingga kelembagaan yang disusun dalam satu kesatuan dokumen perencanaan yang dilaksanakan secara fokus, gradual dan berkesinambungan. Adapun target pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera (KES), tersebut berada pada 3 zonasi tematik RPJPD, yakni:

- a. KES I: Pengembangan Perkotaan (Pusat Perdagangan dan Jasa)
- b. KES II: Industri Hijau 3)
- c. KES III: Pusat Pangan dan Pariwisata.

6. Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan dan menyediakan generasi petani/peternak/nelayan tangguh yang dilaksanakan dengan metode pelatihan, pendampingan, magang dan yang diiringi dengan fasilitasi sarana dan prasarana petani/nelayan. Program ini untuk mendorong tumbuhnya petani/nelayan milenial yang memiliki keterampilan/keahlian pengelolaan pertanian dan perikanan yang maju dan modern dengan metode sekolah dilaksanakan di dalam/luar wilayah Kutai Kartanegara. Selain untuk pengembangan sumber daya manusia, maka perlu didukung pula dengan penguatan kapasitas produksi di seluruh wilayah Kutai Kartanegara dengan penyediaan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang layak dan modern pada sektor perikanan dan pertanian, melalui program bantuan untuk 100 Ribu Petani, Nelayan, dan Peternak Produktif. Dan dalam rangka menjaga kelangsungan nelayan agar mudah mengakses BBM, dilakukan fasilitasi pembangunan SPBN di wilayah potensi perikanan tangkap.

7. Program Kredit Kukar Idaman Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memfasilitasi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Penternak dan Nelayan, untuk mengakses bantuan permodalan yang bersumber dari bank, dengan pengurusan yang mudah, cepat dan tanpa bunga, dengan rentang nilai kredit sampai dengan 500 juta rupiah. Serta memperkuat permodalan pada Koperasi dan BUMDes dengan alokasi sebesar 1 Milyar Rupiah, salah satunya dalam rangka menyediakan pupuk bersubsidi yang dijalankan secara selektif dan berdampak bagi geliat perekonomian di desa/kelurahan.

8. Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk pelestarian dan pengembangan seni budaya Kukar, dengan melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada sanggar seni dan budaya, baik berupa sarana dan prasarana, fasilitasi legalitas kelembagaan, promosi pertunjukan, serta peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan daya tarik destinasi wisata daerah. Dengan kegiatan utama adalah pembangunan pusat seni dan budaya daerah di setiap Kecamatan, re-visioning Pulau Kumala sebagai kawasan wisata kuliner, seni dan budaya nusantara yang modern sebagai bagian dari Pembangunan Tenggara sebagai pusat sejarah dan budaya.

9. Program Stimulus Komunitas Kreatif

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan ruang kepada seluruh insan kreatif di Kutai Kartanegara, dengan membangun ekosistem ekonomi kreatif yang produktif, dengan memberikan stimulus dalam membangun kolaborasi komunitas ekraf minimal bantuan stimulus sebesar 100 juta rupiah bagi komunitas ekraf yang diikuti dengan mengoptimalkan Fasilitas Gedung Ekonomi Kreatif secara gratis sebagai sharing pengetahuan, peningkatan keterampilan, fasilitasi HAKI, dan wadah membangun jaringan kemitraan dan pertunjukan yang diselenggarakan secara kolaboratif. Minimal 2 kali setahun rutin menyelenggarakan kontes karya kreatif yang bertaraf nasional, dan 1 *Event* 1 Kecamatan yang bertaraf Nasional.

10. Program Pelayanan Publik Cerdas

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *smart and good governance* hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan mini mall pelayanan publik cerdas pada setiap Kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep Kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.

11. Program ASN Kukar Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk menjalankan prinsip-prinsip ASN BerAKHLAK secara optimal, dengan fokus pada perbaikan kapasitas SDM Aparatur, melalui implementasi merit system pada jenjang karir yang disertai dengan peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai dan melakukan perbaikan tata kelola Tenaga Honor Lokal salah satunya penyesuaian terhadap UMK yang berkeadilan bersandar pada perhitungan beban kerja yang realistis dan faktual. Selain daripada itu diperkuat dengan peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Dengan kegiatan utama beasiswa tugas belajar kepada ASN potensial mulai jenjang S1, S2 dan S3. Disisi lain dalam upaya meningkatkan keahlian ASN, diperkuat dengan Optimalisasi Pelayanan Diklat Kepegawaian, tahap awal didukung dengan skema kerjasama dengan lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi.

12. Program RT Ku-Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 Juta per RT, menjadi minimal 150 Juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan, prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas

pembangunan daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab. Khusus untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.

13. Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk penghargaan kepada guru mengaji kitab suci (seluruh agama) terdaftar pada lembaga pendidikan keagamaan, serta imam, khotib dan marbot masjid/mushola/rumah ibadah lainnya yang terdaftar, dengan memberikan insentif bulanan yang dikelola secara bertanggung jawab. Selanjutnya untuk memberikan apresiasi kepada pemuka dan pelaku keagamaan disiapkan Umroh Gratis, dan khusus bagi kegiatan-kegiatan pengajian melalui lembaga majelis ta'lim dan shalawat di berikan bantuan 25 juta rupiah untuk menunjang aktivitas rutin yang lebih bernilai. Seluruh kebijakan tersebut diintegrasikan dengan Program RT Ku-Terbaik.

14. Program Jaga Lingkungan Lestari

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui peningkatan pengawasan pada seluruh perusahaan yang beraktifitas di wilayah Kutai Kartanegara untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup, dengan mewajibkan kepada seluruh perusahaan untuk mengalokasikan Program Kelestarian Lingkungan Hidup di sekitar daerah operasi. Selanjutnya melanjutkan program Kukar Peduli Lingkungan dengan menyediakan pengelolaan persampahan yang baik, dengan memperluas pembangunan unit TPS-3R (*reduce, reuse, recycle*) modern dengan standar

kelayakan yang tinggi minimal satu Unit per-kecamatan, serta melanjutkan Program Desa Ramah Lingkungan, dengan target seluruh desa di wilayah Kutai Kartanegara.

15. Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan ruang kepada pemerintahan desa, untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis potensi desa, dengan mendorong kerjasama antar Pemerintah Desa dalam kerangka pembangunan wilayah perdesaan yang di desain secara fokus dan tematik. Adapun kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah desa, melakukan dukungan kebijakan melalui penguatan fiskal pemerintah desa melalui BKAD, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, serta promosi dan pemasaran hasil produk BUMDes. Dengan Mengalokasikan anggaran dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sebesar 100 Milyar Per Tahun. Kondisi ini ditopang pula dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar desa dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

16. Program Internet Desa Gratis

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memastikan Kukar tanpa blank spot dengan menyediakan internet desa secara mudah dan gratis, dengan mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi informasi yang adaptif dan modern.

17. Program Permukiman Idaman Terbaik

Program ini merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk fasilitasi penyediaan rumah murah dan layak huni, yang disertai dengan meningkatkan kualitas permukiman di seluruh wilayah Kutai Kartanegara dengan kegiatan utama peningkatan kualitas jalan lingkungan, penyediaan penerangan jalan umum, perluasan cakupan air bersih, penyediaan energi baru terbarukan, rumah ibadah, drainase, dan ruang terbuka hijau/taman/pemakaman. Untuk mendukung penyediaan permukiman yang layak di wilayah perkotaan, adapun proyek prioritas yang dilaksanakan dalam periode kepemimpinan adalah:

- a. Penataan Permukiman Tepi Sungai;
- b. Fasilitasi Kerjasama dengan Pengembang Perumahan Yang Terjangkau Bagi Korban Bencana/Relokasi dan Masyarakat yang Termasuk Kategori Berpendapatan Rendah.
- c. Penyediaan energi listrik dan air bersih berbasis perdesaan di wilayah wilayah yang belum terjangkau PLN dan PDAM, sebagai pengembangan Program Terang Kampongku dan Program Air Bersih Desa.

Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tugas pokoknya yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kecamatan Kenohan memiliki keterkaitan pada misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu bertujuan Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan dan mempunyai sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi di kecamatan.

➤ Telaahan RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Oleh karena itu, Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.

Telaahan terhadap Renstra K/L menunjukkan adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya telaahan ini juga menunjukkan bahwa capaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kenohan telah berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembangunan merupakan hasil dari revisi kebijakan pembangunan sebagai bagian kristalisasi dari apa yang ingin diwujudkan secara nyata melalui visi dan misi Kecamatan Kenohan hingga akhir periode pembangunan jangka menengah. Secara teknokratik, gambaran nyata dari cita-cita pembangunan diatas akan dicapai secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan pendanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasikan untuk Kecamatan Kenohan.

Terkait dengan tahun rencana, review terhadap isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya, indikasi lokasi program prioritas, indikasi besaran pendanaan program strategis, dan tahapan pelaksanaan program dan Pertumbuhan K/L akan menjadi masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan kebijakan strategis Kecamatan Kenohan pada bab berikutnya.

➤ Telaahan Rencana Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRW berfungsi sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terciptanya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Bahagia.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pedoman untuk :

- a. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah

kabupaten;

- d. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. Rencana sistem pusat kegiatan yaitu mengembangkan kegiatan pendukung kawasan mengembangkan wisata alam Kecamatan Kenohan.
- f. Penetapan pusat pelayanan lingkungan (PPL) yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat peribadatan, pasar lokal, pariwisata, perikanan, industri pengolahan dan kerajinan tangan skala beberapa desa.
- g. Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana Pengembangan jalan strategis Kabupaten/Kecamatan yang menghubungkan : Ruas Jalan dari desa ke Kecamatan dan dari Kecamatan Ke Kabupaten sebagai jalan lokal primer

Berdasarkan Rencana Pengembangan Kecamatan Kenohan :

- a. Pengembangan Prasarana air baku untuk air bersih dari beberapa Desa se- Kecamatan Kenohan;
- b. Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana yaitu meliputi bencana Banjir dan Kebakaran;
- c. Pengembangan Kawasan hutan lindung Kecamatan Kenohan;
- d. Pengembangan sebagai Kawasan resapan air;
- e. Pengembangan sebagai Kawasan sempadan, Kawasan ruang terbuka hijau;
- f. Pengembangan sebagai Kawasan cagar alam dan Cagar Budaya;
- g. Pengembangan sebagai Kawasan peruntukan hutan produksi yaitu berupa Jenis tumbuhan akasia, jati dan mahoni di Kecamatan Kenohan;
- h. Pengembangan peruntukan pertanian dalam arti luas dan Kawasan perkebunan berupa budidaya tebu, kakao, kelapa, cengkeh, lada, aren dan kelapa sawit;
- i. Pengembangan peruntukan perikanan yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- j. Pengembangan peruntukan kawasan pariwisata sebagai peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Kenohan;

Dalam perencanaan pembangunan lima tahun atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah ditetapkan agar tujuan dasar pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Begitupun dalam Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RENSTRA-PD Kecamatan Kenohan juga mengacu pada rencana tata ruang wilayah yang ada sekaligus menelaah perkembangan kajian lingkungan hidup strategis agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tidak mengganggu lingkungan.

- Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan kecamatan

Beberapa isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu: Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN, Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).

- Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

- Aspek Global: Intinya adalah dampak perubahan iklim (seperti debu, banjir, kekeringan) dan tekanan dari permintaan pasar dunia untuk sumber daya alam seperti sawit yang memengaruhi lingkungan di Kecamatan Kenohan.
- Aspek Nasional: Perubahan lahan, peningkatan sampah, tekanan penduduk dan pengaruh kebijakan nasional terkait energi/lingkungan terhadap Kecamatan Kenohan.
- Aspek Regional: Intinya adalah masalah lingkungan lokal dan antar wilayah seperti pencemaran sungai, masalah sampah, dan kejadian banjir yang sering terjadi di sekitar kenohan.
- Pengelolaan Sampah: Volume sampah yang tinggi dengan belum adanya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai, kurangnya

regulasi pengelolaan sampah, dan adanya tempat pembuangan sampah ilegal.

- Kualitas Air Sungai: Penurunan kualitas mutu air sungai kenohan yang dikategorikan "tercemar sedang" hingga "tercemar parah" akibat limbah dari perusahaan sawit yang akan mengancam ketersediaan air bersih.
- Banjir: Permasalahan banjir yang masih sering terjadi, yang diakibatkan oleh curah hujan yang kadang berkepanjangan sehingga air menjadi pasang atau meluap tinggi yang mengakibatkan adanya banjir di Kecamatan Kenohan.

➤ Isu Strategis Perangkat Daerah (Kecamatan Kenohan)

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*excellent service*) yang cepat, mudah, murah, efisien, dan transparan, serta berbasis elektronik.
- Peningkatan Infrastruktur: Prioritas perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan yang masih sangat minim di beberapa wilayah.
- Kemiskinan dan Stunting: Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu strategis yang membutuhkan program penanggulangan terkoordinasi dan efektif.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Kebutuhan untuk mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan akibat eksploitasi (terutama batubara), dan memastikan kelestarian ekosistem.
- Tata Kelola Pemerintahan: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis elektronik dan peningkatan kompetensi aparatur.

Berdasarkan pemaparan gambaran umum pelayanan, identifikasi permasalahan, serta analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis termasuk dimensi KLHS dan isu lingkungan dinamis pada skala global, nasional, dan regional dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kenohan memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Pemahaman menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan proyeksi isu ke depan ini menjadi landasan krusial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah

Kecamatan Kenohan. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah menetapkan visi dan misi yang jelas, serta merancang program kerja yang adaptif dan solutif untuk mencapai pembangunan Kecamatan Kenohan yang lebih maju dan berkelanjutan dalam periode 2025-2029. Adapun teknik penyimpulan Isu Strategis pada table 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Rendahnya Produktivitas	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Akselerasi Pembangunan	Dampak dan Peluang IKN
						Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN	
Memiliki posisi yang strategis (daerah penyangga IKN)	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat			Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemerataan pelayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur
						Infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam, antara lain Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Kehutanan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Industri	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar		Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas	Peningkatan Layanan Infrastruktur
Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat			Kemiskinan dan Stunting
Desa Mandiri sebagai Pilar Ketahanan Sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum optimalnya tata kelola Kecamatan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Ekosistem Pesisir sebagai “Karbon Biru” & Keanekaragaman Hayati		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan					Tata Kelola Pemerintahan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penguatan Regulasi Lingkungan Terbaru							
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)					
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kenohan, 2025

Penjelasan masing-masing isu strategis Kecamatan Kenohan dalam kurun waktu 2025 –2029, adalah sebagai berikut:

1. Dampak dan Peluang IKN

Kecamatan Kenohan sebagai salah satu daerah penyangga di Kabupaten Kutai Kartanegara membuka peluang besar untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari wilayah yang masuk dalam peta zonasi bagian utara, dimana zona utara difokuskan pada pengelolaan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kecamatan Kenohan diproyeksikan akan mengalami perkembangan pesat, baik dari segi infrastruktur maupun migrasi penduduk. Namun, peluang ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait tekanan terhadap lahan produktif, potensi konflik tata ruang, dan dampak sosial-ekonomi dari proses urbanisasi yang cepat. Pemerintah Kecamatan Kenohan harus segera menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan kebijakan pembagian zona oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk pihak pemerintah pusat, akan menjadi kunci untuk memastikan pengembangan potensi yang ada dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak sosial-ekonomi dari migrasi penduduk yang dipicu oleh pengembangan potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata, seperti peningkatan kebutuhan akan perumahan, fasilitas umum, dan lapangan pekerjaan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sistem pelayanan publik di Kecamatan Kenohan masih banyak yang dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan transparansi. Dalam era digitalisasi ini, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah Kecamatan harus segera melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik dengan mengadakan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan aplikasi pelayanan

publik sangat diperlukan. Aplikasi pelayanan publik ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, perizinan, pengelolaan data penduduk, serta mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Meskipun Kecamatan Kenohan memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, infrastruktur dasar di wilayah ini masih terbatas. Beberapa jalan penghubung antar desa dalam kondisi rusak, fasilitas pelayanan publik kurang memadai, dan akses internet yang terbatas menjadi masalah utama. Kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas pelayanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini dalam lima tahun mendatang, pemerintah Kecamatan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi perbaikan jalan antar desa, peningkatan fasilitas kantor Kecamatan dan desa, serta perluasan jaringan internet untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah juga perlu melakukan perencanaan yang matang dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta sektor swasta untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan Kecamatan Kenohan dapat menjadi kawasan yang lebih terhubung, efisien, dan siap menyambut tantangan pembangunan di masa depan.

4. Kemiskinan dan Stunting

Kemiskinan dan stunting masih menjadi tantangan terberat baik itu pemerintah pusat dan daerah. Kemiskinan berkontribusi signifikan terhadap tingginya kasus stunting karena membatasi akses keluarga terhadap gizi yang memadai, layanan kesehatan, dan sanitasi yang bersih. Kemiskinan menciptakan masalah serius di mana ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan dasar pada ibu hamil dan anak-anak, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, yang pada akhirnya menyebabkan stunting.

Dengan adanya pengembangan potensi kewilayahan, diharapkan Kecamatan Kenohan bisa memanfaatkan peluang besar ini. Mengurangi kemiskinan dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan melalui UMKM-UMKM yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan

pariwisata. Dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit masalah kemiskinan bisa berkurang, seiring dengan berkurangnya kemiskinan maka masalah stunting pun bisa teratasi.

Selain mengembangkan perekonomian masyarakat, pihak Kecamatan pun perlu bekerjasama dengan instansi terkait untuk mencegah stunting, karena mengatasi kemiskinan dan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif, kegiatan yang bisa dilakukan seperti diversifikasi pangan yaitu mendorong pangan lokal yang beragam dan bergizi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan seperti beras, peningkatan akses layanan dasar dan meningkatkan peran perempuan serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran gizi, sanitasi dan kebersihan.

5. Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Kecamatan Kenohan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, perkebunan, dan perikanan. Sektor ekonomi lokal di Kecamatan Kenohan, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses ke modal, teknologi, dan pasar. Hal ini menghambat potensi sektor-sektor tersebut untuk berkembang lebih pesat.

Pemerintah Kecamatan Kenohan perlu mendorong investasi di sektor hilir, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program-program pelatihan berbasis kebutuhan lokal juga harus diadakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, memperkuat koperasi sebagai wadah untuk pelaku UMKM dalam mengakses modal dan pasar perlu menjadi prioritas. Peningkatan akses ke pasar regional dan nasional juga harus dilakukan melalui penguatan infrastruktur transportasi dan promosi produk lokal, sehingga masyarakat kenohan dapat lebih mudah memasarkan hasil pertanian dan perikananannya.

Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama pada kawasan pesisir dan sungai.

Kontaminasi air akibat limbah domestik dan industri merupakan salah satu masalah besar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

Untuk menghadapi masalah ini dalam lima tahun ke depan, pemerintah Kecamatan akan melakukan rehabilitasi lahan kritis khususnya pada lahan bekas pembalakan liar dan hutan yang terbakar karena dijadikan masyarakat setempat untuk berkebun. Hal ini diupayakan dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis dan pihak lain termasuk peran masyarakat dan swasta. Program edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan juga akan ditingkatkan, baik kepada masyarakat umum maupun pelaku industri dan usaha.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam menghadapi tantangan pengembangan kewilayahan tentunya tata kelola pemerintahan menekankan bagaimana semua proses, lembaga, dan praktik digunakan untuk mengatur isu publik secara transparan, akuntabel, dan efisien, demi melayani masyarakat dengan baik dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam pembangunan. Pemerintah Kecamatan Kenohan perlu berbenah dalam hal pelayanan publik, mulai dari penyediaan sumber daya manusia yang smart dan profesional, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sarana prasarana pendukung demi lancarnya pelayanan yang diberikan. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti kompleksitas di mana implementasi tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan banyak aspek dan memerlukan intervensi yang kompleks, selanjutnya perlu adanya komitmen dan sinergi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Kenohan dilakukan dengan konsep seperti gambar berikut:

Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Hubungan antara tujuan, dan sasaran dalam renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Tujuan dan sasaran dicapai dengan beberapa strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kenohan

1. Tujuan Renstra Kecamatan Kenohan

Tujuan Renstra Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Kecamatan Samboja menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu

“Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan
di Kecamatan”

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Samboja, yaitu memberikan pelayanan yang prima di wilayah Kecamatan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu *"Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara."* Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan Renstra Kecamatan Kenohan.

2. Sasaran Renstra Kecamatan Kenohan

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kenohan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Kenohan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2025-2029 adalah :

“Meningkatnya kualitas layanan administrasi
di Kecamatan”

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar 3.2 dibawah ini:

Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NSPK: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di kecamatan		Indeks Pelayanan Publik kecamatan	Nilai	n/a	1,28	2,27	2,51	3,01	3,51	4,01	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Meningkatnya layanan administrasi di kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP (PATEN)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib dan Baik	Persen	75	75	75	80	80	90	90	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan Keuangan Penilaian Keuangan: 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskeudes web (20%) Cara hitung: (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di Kecamatan). 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi RKPdes secara 100% (15%) Cara Hitung: Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa di kec 3. Persentase realisasi anggaran (20%) Cara Hitung: jumlah anggaran yang terlaksana 100% / jumlah anggaran desa Penilaian Administrasi: 1. Penyampaian Perdes PPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
												akhir 31 Maret (10%) cara Hitung: jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/ jumlah desa di kec 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung: Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa 3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs (10%) cara hitung: Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%) Cara hitung: Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec)

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Kenohan 2025

3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Kenohan Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kenohan yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Tabel 3.2
Strategi Renstra Kecamatan Kecamatan Kenohan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di kecamatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, regional, dan kabupaten, serta tantangan global yang dapat mempengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Kenohan sangat penting untuk menunjukkan di mana sub kegiatan akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Penetapan Zona Utara Kutai Kartanegara sebagai kawasan prioritas pengembangan pangan dan pariwisata karena memiliki karakteristik wilayah yang mendukung kedua sektor tersebut. Secara geografis, Zona Utara Kutai Kartanegara didominasi oleh bentang alam dataran tinggi dan berbukit dengan kualitas tanah yang subur dan ketersediaan air permukaan yang melimpah sehingga menjadikannya sangat potensial untuk pengembangan pertanian pangan. Selain itu, wilayah ini menyimpan kekayaan biodiversitas, bentang alam yang eksotik, serta budaya lokal yang masih lestari sehingga menjadikannya sangat cocok untuk pengembangan pariwisata berbasis alam, ekowisata, dan wisata budaya.

Dalam perencanaan jangka menengah, zona utara fokus pada pertanian dan pengembangan pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

- Zona Kawasan Pusat Pangan Pembangunan Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian Baru serta Area Perikanan Strategis;
- Pengembangan Kawasan Pariwisata Baru.

Berdasarkan distribusi program prioritas per Kecamatan berdasarkan arah kebijakan kewilayahan, Kecamatan Kenohan yang berada di zona utara menjadi prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan ekonomi berbasis perikanan air tawar serta pariwisata lokal. Kecamatan seperti Kenohan, Kembang Janggut, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, dan Tabang diarahkan untuk:

- Peningkatan produktivitas pertanian (padi dan jagung)
- Peningkatan produktivitas perkebunan (kelapa sawit)
- Penguatan sentra perikanan air tawar.
- Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi alam dan budaya (Desa semayang dan solong pinang habang)
- Penguatan Produksi Lokal (gulaku dan gula merah)

Adapun targetnya terwujudnya lumbung pangan daerah yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor perikanan, serta tumbuhnya ekonomi wisata berbasis kearifan lokal.

Dalam pelaksanaan strategi Pembangunan di Kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kenohan. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

2026	2027	2028	2029	2030
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah serta penguatan kelembagaan pelaku usaha berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan pemanfaatan potensi lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan transformasi produk unggulan berbasis ekonomi hijau sebagai upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan daerah	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Pengembangan aksesibilitas wilayah dan fasilitas publik berwawasan lingkungan untuk mendukung pemerataan pembangunan.	Pengembangan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Perwujudan sistem infrastruktur aksesibilitas dan mobilitas yang modern, dan terhubung	Penerapan Integrasi jaringan infrastruktur antar wilayah yang menunjang konektivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah

2026	2027	2028	2029	2030
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan	Penguatan kolaborasi multi pihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Penguatan Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat	Penerapan Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan energi terbarukan dan akselerasi pengurangan emisi karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Kenohan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap.

Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Kenohan pada table 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyelenggaraan Pelayanan yang Prima	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Implementasi standar pelayanan dan digitalisasi pelayanan di tingkat Kecamatan	Melalui pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Implementasi pelayanan prima berbasis digital	Kecamatan sebagai pelaksana layanan dasar
3	Pembinaan dan pengawasan Administrasi desa	Penguatan regulasi dan tata kelola yang	Fasilitasi capaian program prioritas	Dilakukan melalui monitoring dan

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		adaptif, konsisten dan implementatif	pembangunan daerah	laporan realisasi
4	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan desa	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Kecamatan sebagai pengawas teknis pelaksanaan DD	Dilakukan melalui tim teknis kecamatan
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Penguatan kewenangan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan sektor teknis	Menyesuaikan dengan pelimpahan urusan dari bupati
			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	
			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu.

Adapun rencana program merupakan bagian dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis OPD.

Rumusan arah kebijakan menjelaskan cara-cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program prioritas pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan dan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra).

Dengan berbagai faktor internal, eksternal dan dinamika politik yang sedang terjadi pelaksanaan pembangunan daerah mengalami gejolak. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi hasil capaian pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut maka perlu dilakukan penyelarasan program dan kegiatan dengan kondisi dan tantangan pembangunan daerah.

Dengan demikian dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. Yang didefinisikan seperti pada di bawah ini.

4.1 Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kenohan ditentukanlah program, dan kegiatan. Terkait Visi Misi yang ada pada RPJMD adalah sebagai berikut :

Visi : Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan,Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi ini bertujuan untuk menjadikan Kutai Kartanegara sebagai daerah yang unggul dalam sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal dengan pendekatan berkelanjutan, serta memperkuat aspek budaya dan kesejahteraan masyarakat.

Misi-misi yang dirumuskan untuk mendukung visi tersebut adalah:

1. Transformasi Sosial: Meningkatkan kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing.
2. Transformasi Ekonomi: Mengembangkan sektor non ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Transformasi Tata Kelola: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien.
4. Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi: Meningkatkan demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi daerah.
5. Ketahanan Sosial-Budaya dan Ekologi: Memperkuat identitas budaya dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
6. Pembangunan Kewilayahan: Mengembangkan konektivitas dan integrasi regional.
7. Sarana Prasarana Berkualitas: Menghadirkan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Kestinambungan Pembangunan: Memastikan pembangunan yang berkesinambungan.

Dari Visi dan Misi tersebut merupakan komponen strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah juga menjadi dasar dalam menyusun dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Visi dan misi adalah fondasi utama bagi perangkat daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan

mengevaluasi pembangunan. Keduanya memastikan perangkat daerah berjalan dengan arah yang jelas, selaras dengan tujuan pembangunan daerah, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. sangat relevan dengan kinerja perangkat daerah Kecamatan Kenohan karena mencakup Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengembangan Potensi Lokal Untuk mencapai visi misi ini, diperlukan kinerja pelayanan yang maksimal. Namun, berbagai faktor pendorong dan penghambat dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan yaitu dukungan Infrastruktur dan Teknologi, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Partisipasi Masyarakat, Ketersediaan Anggaran yang Memadai, dan Komitmen Pemerintah Daerah dan faktor yang menghambat seperti Keterbatasan Infrastruktur, Sebagian aparatur belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelayanan berbasis teknologi, Rendahnya pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi terpadu, Tumpang tindih kewenangan antara Kecamatan dengan perangkat daerah lainnya sering kali memperlambat pelaksanaan program.

Program prioritas yang relevan dengan Kecamatan Kenohan sebagaimana tercantum dalam rancangan teknokratik RPJMD Kukar 2025-2029 berkenaan dengan Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan perbaikan jalan desa, jembatan, serta infrastruktur transportasi lainnya, Mendorong program pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan, Meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelayanan publik di Kecamatan melalui implementasi teknologi digital dan e-government, Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Untuk mencapai visi misi ini Kecamatan Kenohan menentukan program, dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan merupakan Program untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam prosesnya.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat kecamatan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan program pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan teratur di masyarakat, melalui koordinasi berbagai pihak terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi lainnya.

Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan aman, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan tertib, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh camat sebagai perpanjangan tangan bupati/walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, mencakup pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta penanganan konflik sosial dan pelaporan

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh camat selaku perangkat daerah kabupaten/kota untuk membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kenohan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di kecamatan
11. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan

15. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
16. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
17. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
18. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3 Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Adalah Bagian Dari Kegiatan yang lebih spesifik dan terperinci. Sub kegiatan merupakan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kenohan sebagai berikut:

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan
3. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan
4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
8. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan
9. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
10. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan
11. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat

12. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
13. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan
14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
16. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
17. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
18. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
19. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
22. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
23. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
25. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
26. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
27. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
28. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
29. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
30. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
31. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
32. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
33. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

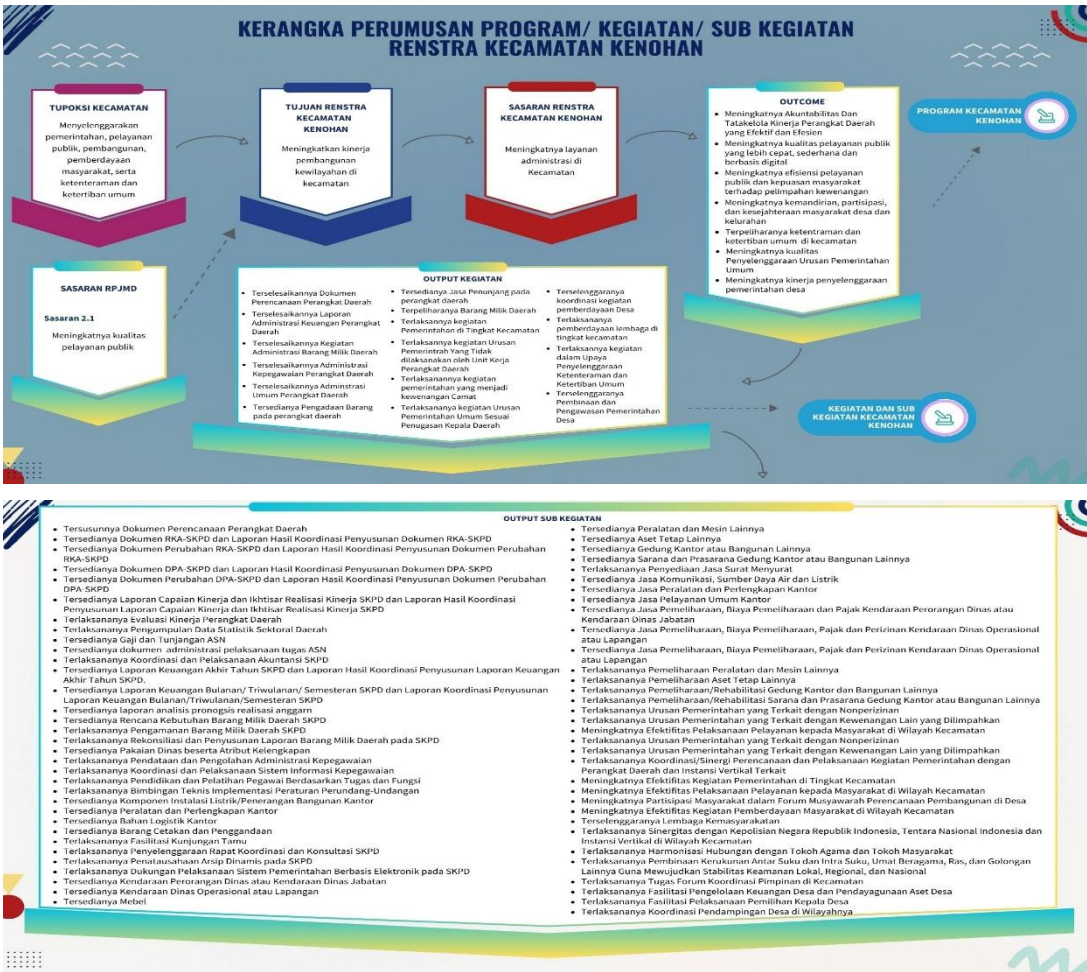
34. Fasilitas Kunjungan Tamu
35. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
36. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
37. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38. Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
39. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
40. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
41. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
42. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
43. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
44. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
45. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kenohan merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kenohan juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kenohan serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kenohan dijelaskan pada gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di kecamatan	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan Di kecamatan				Indeks Pelayanan Publik kecamatan		
		Meningkatnya Layanan Administrasi di kecamatan	Peningkatan kepuasan masyarakat, efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta peningkatan citra pemerintah	Peningkatan kualitas serta efisiensi dalam pelayanan publik yang disediakan oleh kantor Kecamatan Kenohan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP		
					Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib dan Baik		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan		Persentase pelayanan perizinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program
			Meningkatnya keterjangkauan pelayanan publik		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya sinergi antar instansi dalam kegiatan pemerintahan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan
				Terlaksananya koordinasi dan integrasi perencanaan kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Sub Kegiatan
				Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan
				Terselenggaranya pelayanan minimal sesuai ketentuan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan
				Tersedianya Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya urusan nonperizinan secara efektif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Sub Kegiatan
				Kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai kewenangan Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sub Kegiatan
			Terselesaikannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sub Kegiatan
				Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga di tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan
				Terlaksananya pembinaan kelembagaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terselesaikannya Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang melibatkan Kepolisian, Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah kecamatan		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program
				Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan
				Tersedianya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Sub Kegiatan
				Terjaganya hubungan harmonis antar umat beragama dan tokoh masyarakat	Jumlah kegiatan rapat yang melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terlaksananya Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan
				Meningkatnya stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan
				Terlaksananya koordinasi lintas unsur dalam mendukung tugas pemerintahan kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan	Sub Kegiatan
			Tercapainya Kinerja Pelayanan Publik di Kecamatan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program
				Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
				Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah tepat waktu dan lengkap	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya koordinasi dan efisiensi dalam penyusunan anggaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan
				Meningkatnya koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan
				DPA-SKPD tersusun secara valid dan operasional	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
				Tersusun nya DPA - SKPDPerubahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan
				Capaian dan realisasi kinerja dapat dimonitor dan dievaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan
				Kinerja perangkat daerah dapat ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				Tersedianya data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				Tersusunnya Laporan Barang Pada Perangkat daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan
				Tersusunnya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan
				Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan
				Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan
				Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan
				Tersusunnya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan
				Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan
				Tersedianya Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan
				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan
				Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
				Terbangunnya Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan
				Jumlah waktu Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
				Tersedianya surat menyurat	Jumlah surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan
				Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan
				Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan
				Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Program
				Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan
				Terselenggaranya koordinasi pendampingan desa secara efektif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sub Kegiatan

4.4 Pendanaan Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				12.298.955.674,00		30.505.305.991,72		31.965.868.385,34		35.144.623.142,09		37.667.058.124,45		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.697.449.674,00		8.833.049.674,00		8.933.049.674,00		8.933.049.674,00		8.933.049.674,00		
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan (Kenohan)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	70	75	4.697.449.674,00	76	8.833.049.674,00	77	8.933.049.674,00	78	8.933.049.674,00	79	8.933.049.674,00	7.01.1.03.0.00.13.0000 - Kecamatan Kenohan	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				320.000.000,00		540.000.000,00		540.000.000,00		540.000.000,00		540.000.000,00		
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		30	320.000.000,00	1	540.000.000,00	1	540.000.000,00	1	540.000.000,00	1	540.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)				2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)				2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)				2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)				2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)				2		2		2		2			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)				14		14		14		14			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			0,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			0,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			0,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			0,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				30.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	30.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)		30	250.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)			0,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.339.919.674,00		3.482.999.674,00		3.482.999.674,00		3.482.999.674,00		3.482.999.674,00		
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	288	3.339.919.674,00	288	3.482.999.674,00	288	3.482.999.674,00	288	3.482.999.674,00	288	3.482.999.674,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)				2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.232.999.674,00		3.232.999.674,00		3.232.999.674,00		3.232.999.674,00		3.232.999.674,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	288	3.232.999.674,00	288	3.232.999.674,00	288	3.232.999.674,00	288	3.232.999.674,00	288	3.232.999.674,00		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	1	15.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				91.920.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	91.920.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)			0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				84.200.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			84.200.000,00	4	550.000.000,00	4	550.000.000,00	4	550.000.000,00	4	550.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)				2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	8	50.000.000,00	8	200.000.000,00	8	200.000.000,00	8	200.000.000,00	8	200.000.000,00		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)			0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				34.200.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	34.200.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00	8	250.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00	8	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				40		40		40		40			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0,00	40	100.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00	40	150.000.000,00		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0,00	8	150.000.000,00	8	150.000.000,00	8	150.000.000,00	8	150.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				261.280.000,00		528.000.000,00		528.000.000,00		528.000.000,00		528.000.000,00		
Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	261.280.000,00	1	528.000.000,00	1	528.000.000,00	1	528.000.000,00	1	528.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	55.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.280.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	2.280.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	10.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	150.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				9.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	9.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		
Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	4	200.000.000,00	1	2.600.000.000,00	1	2.600.000.000,00	1	2.600.000.000,00	1	2.600.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		3		3		3		3			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	4	200.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				290.800.000,00		630.800.000,00		630.800.000,00		630.800.000,00		630.800.000,00		
Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	290.800.000,00	12	630.800.000,00	12	630.800.000,00	12	630.800.000,00	12	630.800.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0		168		168		168		168			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				278.800.000,00		278.800.000,00		278.800.000,00		278.800.000,00		278.800.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	278.800.000,00	12	278.800.000,00	12	278.800.000,00	12	278.800.000,00	12	278.800.000,00		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0,00	168	300.000.000,00	168	300.000.000,00	168	300.000.000,00	168	300.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201.250.000,00		251.250.000,00		301.250.000,00		301.250.000,00		301.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	10	201.250.000,00	10	251.250.000,00	10	301.250.000,00	10	301.250.000,00	10	301.250.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		11		11		11		11			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	2	51.250.000,00	2	51.250.000,00	2	51.250.000,00	2	51.250.000,00	2	51.250.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	11	50.000.000,00	11	100.000.000,00	11	100.000.000,00	11	100.000.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.720.506.000,00		7.260.256.318,00		8.620.818.711,34		11.799.573.468,09		14.322.008.450,45		
Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (kenohan)	Indeks pelimpahan kewenangan pada Kecamatan (Nilai)	0	3	6.220.506.000,00	3	6.610.256.318,00	3	7.970.818.711,34	3	11.149.573.468,09	3	13.672.008.450,45	7.01.1.03.0.00.13.0000 - Kecamatan Kenohan	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				6.220.506.000,00		6.610.256.318,00		7.970.818.711,34		11.149.573.468,09		13.672.008.450,45		
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	26	6.220.506.000,00	28	6.610.256.318,00	35	7.970.818.711,34	51	11.149.573.468,09	64	13.672.008.450,45		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12		10		10		10		10			
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				1.012.506.000,00		1.012.506.000,00		1.012.506.000,00		1.012.506.000,00		1.012.506.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12	12	1.012.506.000,00	10	1.012.506.000,00	10	1.012.506.000,00	10	1.012.506.000,00	10	1.012.506.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5.208.000.000,00		5.597.750.318,00		6.958.312.711,34		10.137.067.468,09		12.659.502.450,45		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	26	5.208.000.000,00	28	5.597.750.318,00	35	6.958.312.711,34	51	10.137.067.468,09	64	12.659.502.450,45		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (kenohan)	Persentase pelayanan perizinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	100	100	500.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	3	100.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)				1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)			0,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436.000.000,00		13.536.000.000,00		13.536.000.000,00		13.536.000.000,00		13.536.000.000,00		
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Kenohan)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (%)	80	81	436.000.000,00	82	13.536.000.000,00	83	13.536.000.000,00	84	13.536.000.000,00	85	13.536.000.000,00	7.01.1.03.0.00.13.0000 - Kecamatan Kenohan	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	2	100.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	9		9		9		9		9			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	9	50.000.000,00	9	200.000.000,00	9	200.000.000,00	9	200.000.000,00	9	200.000.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				336.000.000,00		13.286.000.000,00		13.286.000.000,00		13.286.000.000,00		13.286.000.000,00		
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		35	336.000.000,00	92	13.286.000.000,00	92	13.286.000.000,00	92	13.286.000.000,00	92	13.286.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				336.000.000,00		13.286.000.000,00		13.286.000.000,00		13.286.000.000,00		13.286.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		35	336.000.000,00	92	13.286.000.000,00	92	13.286.000.000,00	92	13.286.000.000,00	92	13.286.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175.000.000,00		361.000.000,00		361.000.000,00		361.000.000,00		361.000.000,00		
Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Kenohan)	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	80	81	175.000.000,00	82	361.000.000,00	83	361.000.000,00	84	361.000.000,00	85	361.000.000,00	7.01.1.03.0.00.13.0000 - Kecamatan Kenohan	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				175.000.000,00		361.000.000,00		361.000.000,00		361.000.000,00		361.000.000,00		
Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	2	175.000.000,00	2	361.000.000,00	2	361.000.000,00	2	361.000.000,00	2	361.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				50.000.000,00		236.000.000,00		236.000.000,00		236.000.000,00		236.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	12	50.000.000,00	12	236.000.000,00	12	236.000.000,00	12	236.000.000,00	12	236.000.000,00		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195.000.000,00		415.000.000,00		415.000.000,00		415.000.000,00		415.000.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kenohan)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	195.000.000,00	100	415.000.000,00	100	415.000.000,00	100	415.000.000,00	100	415.000.000,00	7.01.1.03.0.00.13.0000 - Kecamatan Kenohan	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				195.000.000,00		415.000.000,00		415.000.000,00		415.000.000,00		415.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0	12	195.000.000,00	12	415.000.000,00	12	415.000.000,00	12	415.000.000,00	12	415.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	70		70		70		70		70			
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				180.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	70	180.000.000,00	70	400.000.000,00	70	400.000.000,00	70	400.000.000,00	70	400.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Kenohan)	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (%)	85	85	75.000.000,00	86	100.000.000,00	87	100.000.000,00	88	100.000.000,00	89	100.000.000,00	7.01.1.03.0.00.13.0000 - Kecamatan Kenohan	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	12	75.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	12	75.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		

4.5 Sub Kegiatan Prioritas

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel. 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Program RT Ku-Terbaik	Penyaluran Program RT di kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kegiatan
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Sub Kegiatan
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Program Pelayanan Publik Cerdas	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Sub Kegiatan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
		Bangunan Lainnya Mini Mall Pelayanan Publik di kecamatan	Bangunan Lainnya	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di kecamatan	Kegiatan
		Tersedianya Operasional Mini Mall Pelayanan Publik di kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah kecamatan	Sub Kegiatan

4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kenohan sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kenohan

No	Indikator	Satua	Target Tahunan						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IKU Tujuan									
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai	1,28	2,27	2,51	3,01	3,51	4,01	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Kecamatan berdasarkan: • Aspek Kebijakan Pelayanan, • Aspek Profesionalisme SDM, • Aspek Sarana Prasarana, • Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, • Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta • Aspek Inovasi.
IKU Sasaran									
1	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	Cara Hitung: <u>Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP</u> Total Jumlah Pelayanan dikali 100

No	Indikator	Satua	Target Tahunan						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik	Persen	75	75	80	80	90	90	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan Penilaian Keuangan: 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi Siskeudes web (20%) Cara Hitung: <u>Jumlah Desa tepat waktu</u> Jumlah Desa di kecamatan 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi RKPdes secara 100% (15%) Cara Hitung: <u>Jumlah Desa optimal aplikasi</u> Jumlah Desa di kecamatan 3. Persentase realisasi anggaran di atas 90% (20%) Cara Hitung: <u>Jumlah Desa realisasi anggaran >90%</u> Jumlah Desa di kecamatan

No	Indikator	Satua	Target Tahunan						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Penilaian Administrasi: 1. Penyampaian Perdes LPPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) Cara Hitung: Jumlah Desa menyampaikan ≤31 Maret Jumlah Desa di kecamatan 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung: <u>Jumlah Desa menyampaikan ≤31 April</u> Jumlah Desa di kecamatan 3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs (10%) Cara Hitung: <u>Jumlah Desa Terisi Prosdekel & SDGS</u> Jumlah Desa di kecamatan 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%). Cara Hitung: <u>Jumlah Desa Menyampaikan laporan</u> Jumlah Desa di kecamatan

BAB V

P E N U T U P

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi (1) indikator masukan, (2) Indikator keluaran, (3) Indikator hasil, (4) Indikator manfaat, dan (5) Indikator dampak. Indikator masukan ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Insya Allah Visi tersebut dapat tercapai di masing-masing unit kerja yg diharapkan dapat/mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat, mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kenohan pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya.

Kenohan, 12 Januari 2026

CAMAT KENOHAN,

The image shows a circular official stamp of the Government of Kutai Kartanegara, Kecamatan Kenohan. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA" and "KECAMATAN KENOHAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

H. KASPUL, SE, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19680409 198903 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KENOHAN**



**RANCANGAN AKHIR RENSTRA
KECAMATAN KENOHAN
TAHUN 2025-2029**